

Depok Single Window



Waktu Sholat Wilayah Depok

Subuh
04 : 11

Dhuhur
11 : 36

Ash...



Kampung Siaga



Pajak



Ekonomi



Kependudukan

Berita Terkini :

3M ADAPTASI KEBIASAAN BARU



MEMAKAI MASKER



MENCUCI TANGAN



MENJAGA JARAK



Raih Penghargaan Proklam Tingkat Nasional, Ketua RW 01 Ratujuaya: Ini Bisa Jadi Motivasi
27 April 2020



Pemkot Bersiap Vaksinasi Covid-19, Fasilitas Kesehatan Mulai Didata
27 April 2020

Harga Komoditas Hari Ini :



Cabai Merah Besar (Besar)
Rp. 32.000/kg
(Harga satuan Rp. 32000)



Telur Ayam Broiler
Rp. 23.000/kg
(Harga satuan Rp. 23000)



Bakung Babi, Liris
Rp. 120.000/kg
(Harga satuan Rp. 120000)



Bakung Ayam Tempung
Rp. 100.000/kg
(Harga satuan Rp. 100000)



Cabai Merah
Rp. 28.000/kg
(Harga satuan Rp. 28000)



HOME



BERITA



DARURAT



CUACA



PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS (REVIU)

2016 - 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

www.depok.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan peraturan baru ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok mendapat tambahan 2 (dua) bidang urusan baru, yaitu Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian. Di sisi lain dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa Pemerintah Kota Depok agar melakukan penyesuaian terhadap sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikatornya, maka adanya perubahan kebijakan inilah yang melandasi adanya perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021 yang telah disusun sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Rencana Strategis PD dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja-PD) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD (RKA-PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Noomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi secara terfokus.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil/pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja organisasi.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Membahas dan menjabarkan mengenai Tugas Pokok dan fungsi , Sumberdaya serta Kinerja Pelayanan Dinas serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berisi isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam periode Tahun 2016-2021.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah selama 5 Tahun kedepan juga program unggulan Kepala Daerah yang perlu didukung melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan tentang Matriks rencana program Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dalam kegiatan tahunan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUDAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi yang disusun secara matriks, untuk mengetahui capaian awal dan akhir setelah program kerja dilaksanakan

BAB VII PENUTUP

Berisi langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh Bidang-bidang dan Seksi-seksi organisasi sebagai berikut :

- A. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- B. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik.

- C. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 2. Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika;
 3. Seksi Aplikasi.
- D. Bidang Statistik dan Persandian, dengan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
1. Seksi Statistik;
 2. Seksi Persandian;
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

2.1.1.1 KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b). Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statsitik serta Persandian;

- c). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d). Pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta persandian;
- e). Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.2 SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Dinas .
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a). Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b). Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c). Penyelenggaraan administrasi umum;
 - d). Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e). Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f). Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

- g). Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h). Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i). Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dinas;
- j). Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k). Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l). Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m). Pelaksanaan tugas - tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum di atas, Sub Bagian Umum, Perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari Bidang;
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja dinas;
- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- m. Pelaksanaan penyusunan Renstra dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas;
- o. Penyusunan program kerja tahunan dinas;
- p. Penyusunan rancangan produk hukum dinas;
- q. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. Pelaksanaan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas;
- g. Penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan Analisis dan Pengembangan Kinerja SubBagian;dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, integrasi dan pengendalian informasi dan komunikasi publik;
 - e. Penyediaan Informasi dan bahan komunikasi publik yang berkualitas, lengkap, akurat, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna;
 - f. Penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik guna perumusan kebijakan dalam menyusun Perencanaan dan mengevaluasi program-program;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- 1). Seksi Pengelolaan Informasi

Seksi Pengendalian Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengolahan dan pengendalian dibidang informasi media, komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengendalian Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian informasi mengacu pada rencana kerja bidang data dan informasi;
- b. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten, serta fasilitasi perkembangan informasi;

- c. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian informasi, media komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
- f. Pelaksanaan Diseminasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi;
- g. Pelaksanaan Pengolahan, penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota;
- h. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik melalui Media cetak, media Elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan Informasi, baleho, spanduk, majalah dinding, film serta melalui media Tradisional, dan Kelompok Informasi masyarakat Kota serta media lainnya;
- i. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kehumasan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan data komunikasi/kehumasan sebagai bahan penyusunan kebijakan komunikasi/kehumasan pemerintah kota;

- c. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam pengumpulan sumber informasi;
- d. Pengkoordinasian dalam pengendalian informasi;
- e. Pengumpulan informasi kegiatan pemerintahan dan penyusunan release berita;
- f. Pengkordinasian dan hubungan kerja dengan media massa kegiatan pemerintah kota;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.4. BIDANG BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

1. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Aplikasi Informatika.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Aplikasi Informatika mengacu pada Rencana strategi dinas;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Aplikasi Informatika;
 - c. Penyusunan bahan Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - d. Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - e. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi Aplikasi Informatika;
 - f. Pelaksanaan pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Aplikasi Informatika;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

1). Seksi Pengembangan Infrastruktur

Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengembangan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur mengacu pada program kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengembangan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
- c. Pelaksanaan Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Akses Internet Pemerintah dan Publik;
- d. Pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- e. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan pemerintah;
- f. Pelaksanaan penetapan alokasi *Internet Protocol* dan *Numbering* dilingkungan pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis strategi pengembangan infrastruktur, operasional dan Pemeliharaan Teknologi Informasi dilingkungan pemerintah kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika

Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Kelola Teknologi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Kelola Tehnologi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola Tehnologi Informatika mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *E-Government*;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- d. Pelaksanaan penetapan standarisasi format data dan informasi, walidata dan kebijakan serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Aplikasi Teknologi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi mengacu pada rencana kerja bidang;

- b. Pelaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis;
- c. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi baik yang proprietary maupun yang mandiri (generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi);
- d. Pelaksanaan layanan domain dan sub domain pemerintah kota;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi E-Government;
- f. Penyiapan bahan perkerjasama pengembangan sistem informasi dan kebutuhan pembangunan sistem informasi;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi/sistem informasi;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi dilintas organisasi perangkat daerah;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.1.1.5 BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan di bidang Statistik dan Persandian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Statistik dan Persandian mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan statistik dan persandian dengan berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM;
- d. Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- e. Peningkatan kesadaran keamanan informasi (*security awareness*);
- f. Pengelolaan Pusat data persandian;
- g. Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing masing perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian;
- i. Pengelolaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi;
- j. Pengelolaan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

1). Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Statistik mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis bidang data dan analisa pembangunan;
- c. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Seksi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota Depok di bidang statistik;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi bidang statistik;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan statistik sektoral;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

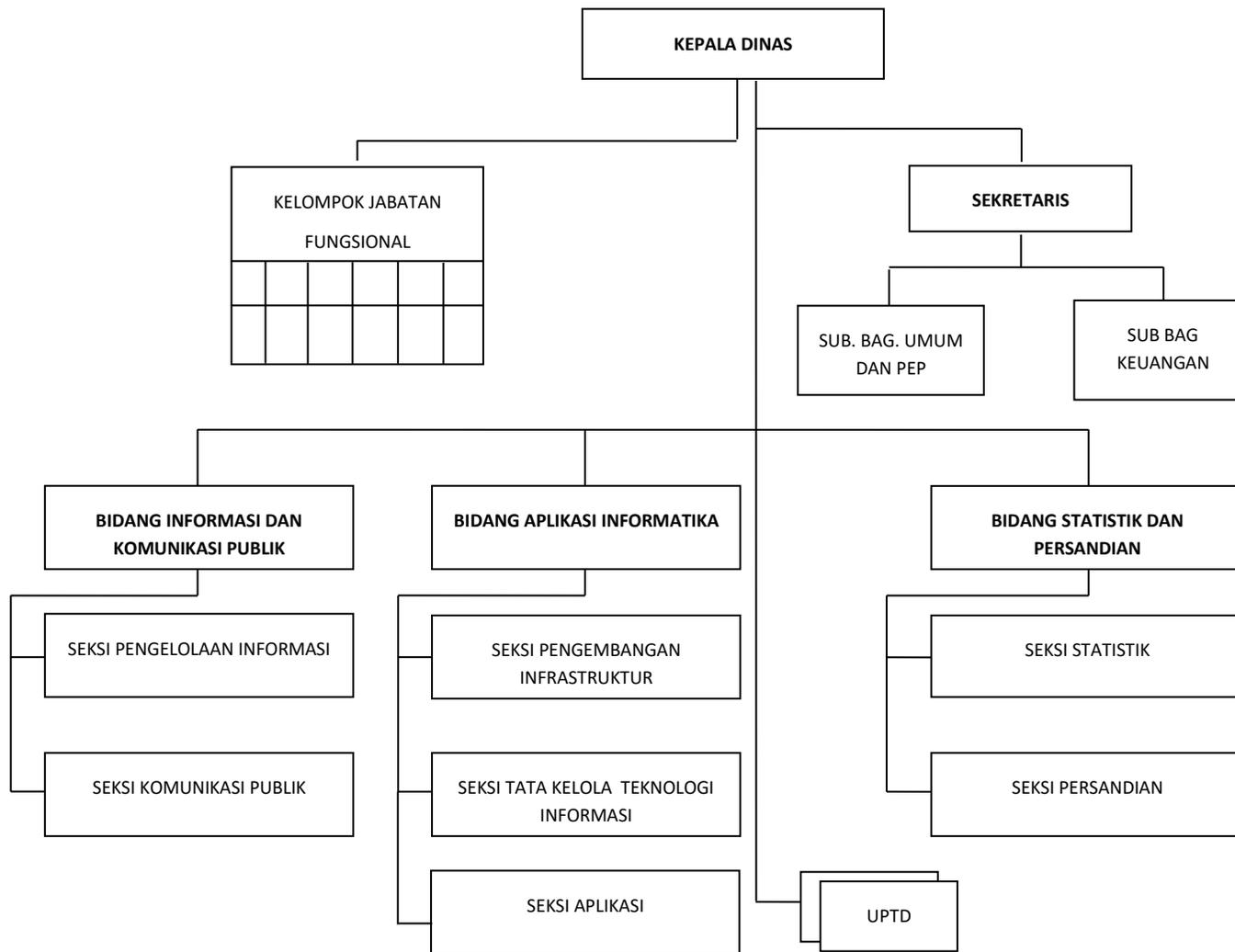
2). Seksi Persandian.

Seksi Persandian mempunyai tugas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah kota;
- b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional Pengamanan komunikasi sandi;
- f. Pengukuran tingkat kerawanan dan Keamanan Informasi;
- g. Pengelolaan Informasi berklasifikasi melalui pengklarifikasi dan pengamanan Informasi milik Pemerintah Kota;
- h. Pengelolaan Proses Pengamanan Informasi milik Pemerintah Kota;
- i. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran Informasi berklasifikasi;
- j. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- k. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah kota melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;

- l. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
- m. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras persandian;
- n. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandiaan, perangkat keras persandiaan dan jaring komunikasi persandiaan;
- o. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandiaan dalam operasional Komunikasi sandi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota;
- p. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandiaan dalam operasional komunikasi sandi antar 18 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah



Gambar 2.1
Diagram Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMINFO KOTA DEPOK

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini, meliputi :

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok saat ini sebanyak 49 orang, terdiri dari 23 laki-laki dan 26 perempuan dengan 1 pegawai tidak tetap. Dari sejumlah 49 pegawai tersebut, 5 orang pranata hubungan masyarakat dan, 8 orang pranata komputer, dan 2 orang calon pranata komputer dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2018

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Gol. IV	3
2.	Gol. III	35
3.	Gol. II	10
4.	Gol. I	-
5.	Tenaga Kontrak	1

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2018

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SMK / SMU	4
2.	D III	7
3.	D IV	2
4.	S 1	28
5.	S 2	7
6.	S 3	1

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dalam Jabatan Struktural
Tahun 2018

No.	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	II a	1
2.	III a	1
3.	III b	3
4.	IV a	10
5.	IV b	1

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Menempuh Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2018

No.	Diklat PIM	Jumlah Pegawai
1.	Diklat PIM Tk. II	-
2.	Diklat PIM Tk. III	4
3.	Diklat PIM Tk. IV	6

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Outsourcing Diskominfo Kota Depok Tahun 2018

No.	Bagian	Jumlah Pegawai
1.	Mobile Community Access Point (Mcap)	3
2.	Jurnalis / Peliput Berita	11
3.	Petugas 112	15
4.	Editor	6
5.	Call Center	5
6.	Running Text Videotron	1
7.	Tim Produsen	4
8.	Petugas Pengelola Data (Data Warehouse)	2
9.	Petugas Network	2
10.	Petugas Pengelola Data dan Techical Support	1
11.	Petugas Administrasi Data dan Techical Support	1
12.	Administrasi	1
13.	Network Operation Center	1

2.2.2 ASSET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG)

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Pendukung
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Peralatan dan mesin	65
	Alat – alat angkutan	-
	Alat bengkel dan alat ukur	-
	Alat kantor dan rumah tangga	50
	Alat studio dan alat komunikasi	11
	Alat - alat kedokteran	-
	Alat laboratorium	4
	Alat – alat persenjataan / keamanan	-
2.	Gedung dan bangunan	1
	Bangunan gedung	1
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	-
	Instalasi	-

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa ketersediaan peralatan dan mesin di Diskominfo Kota Depok baru tersedia sebanyak 65 buah dengan rata-rata pembelian telah lebih dari 2 tahun sehingga dibutuhkan beberapa peralatan lainnya untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Diskominfo Kota Depok seperti peralatan untuk peliputan diantaranya kamera 3D, Handycam, dll. Selain itu Diskominfo Kota Depok juga masih membutuhkan beberapa server dengan kapasitas besar untuk mendukung pelayanan e-government di Kota Depok dan juga peralatan untuk menunjang pelaksanaan pengamanan informasi dan persandian di Kota Depok.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Capaian kinerja pelayanan dan kinerja anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama beberapa tahun ke belakang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel. 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

NO.	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan layanan Informasi	20%	84.52%	Jumlah hot spot sd Th 2013 sebyk 94 titik (23 titik di Jl. Margonda, 3 titik di BMSDA, 3 titik di Taman lembah Gurame, 63 titik kelurahan, 2 titik di rumah pintar Cilodong)	30%	92.18%	1 Paket LAN (47 Titik Hotspot), Biaya Sewa 3 Layanan Internet, Pemeliharaan Jaringan LAN 11 OPD, WAN 40 Titik dan Running Text 3 Titik, 96 Kali Kunjungan M-CAP ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan	40%	89.30%	20 Titik Hotspot, 1 Paket sarana pendukung Smart Center, 4 Layanan Internet (Utama, Backup, Monitoring dan publik), pemeliharaan LAN, WAN dan Running Text (29 OPD, 161 Titik Hotspot dan 3 titik Running Text), Pembongkaran 1 titik lokasi Running Text, 100 kali kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan, 2 Paket Sistem Komunikasi Berbasis Internet, 13 Unit Laptop dan 1 Paket Konsultansi Perencanaan Ducting Bersama	50%	82.40%	4 titik Taman Merdeka, 2 titik di balai wartawan, 1 titik Rumah Pintar Cilodong, 1 titik kantor RW, 2 titik Running text (Jl. Margonda dan Ry Bogor), pemasangan 3 running text (Jl. Margonda, Jl Raya Bogor dan Jl Raya Cibubur)

2	Terintegrasinya aplikasi TIK antar unit pelayanan	50%	75.41%	1 aplikasi mobile layanan informasi (aplikasi visit Depok), 7 kegiatan, 10000 buku panduan bintek KIM	75%	69.46%	7 Paket, 2 Kegiatan, 5.000 Lembar Sticker, 2 KIM Tk.Kecamatan, 164 Kali Advetorial dan Event, 310 Menara Postel dan Monev 100 Warnet	75%	88.10%	1 Paket Event TIK Depok, 250 Menara di 63 Kelurahan, 1 Kegiatan, 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan, 1 Paket Rak Server dan 1 Paket Alat Pemadam Kebakaran, 10 Kali Pertemuan, Advetorial Media Cetak Lokal 165 Kali, Advetorial Media Online Nasional 8 Kali, Advetorial Media Online Lokal 80 Kali, 4 Kegiatan Event, 1 Paket Aplikasi Integrasi Data, 1 Paket Aplikasi Sistem Manajemen Daerah dan 5 Paket Pengembangan Aplikasi SIMPEG dan SKP, 1 Paket Aplikasi Bidang Sosial dan 1 Paket Aplikasi Bidang Kesehatan	100%	100%	10 kegiatan, pengendalian dan pengawasan 230 menara, sosialisasi Perda berkaitan dengan warnet sebanyak 5 kali d 11 kecamatan
---	---	-----	--------	---	-----	--------	--	-----	--------	---	------	------	---

3	Efektivitas sarana informasi publik (warta depok)	64%	73.45%	73,45% (2 Kegiatan dan 300.000 Eksemplar Warta Depok, Baliho 24 Buah, Backdrop 5 Buah, Poster 500 lembar, Leaflet 500 Lembar, Spanduk 100 Buah, Buku 1.000 Eksemplar, Sosialisasi Radio Swasta 16 Kali, Sosialisasi melalui RRI 9 Kali, Sosialisasi melalui TV 4 Kali, Sosialisasi melalui Web Swasta Lokal 6 Kali)	76%	49.25%	300.000 exp warta depok, 24 baliho, 100 spanduk, 5000 lbr poster, 6000 brosur, 53 backdrop, 500 lbr stiker, 6000 buku, 1 paket media tradisional, 4 set digital signed, 14 x talkshow radio, 6 paket Tv swasta, 2 kegiatan	88%	89.43%	89,43% (Warta Depok 300.000 Eksemplar, 100 Buah Spanduk, 1.000 Lembar Poster, 2.000 Lembar Leaflet/Brosur, 20 Buah Back Drop Kain, 2.000 Eksemplar Cetak Buku, 1.500 Cetak Kipas Sosialisasi, EO Media Tradisional 1 Paket, Belanja Pembangunan Papan Informasi Media Luar Ruang 4 Paket, Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kontruksi Papan Informasi Media Luar Ruang 2 Paket, 6 Paket Sosialisasi melalui Televisi, Pengadaan Videotron 1 Unit dan Kontruksi Tiang Videotron 1 Paket, 1 Kali sosialisasi Internet Sehat, 50 Berita/Informasi per bulan, 2.000 cetak cutting sosialisasi website depok.go.id, 12 stel seragam jurnalis www.depok.go.id, 3 Jenis Layanan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)	100%	90.67%	250.000 exp warta Depok, 134 baliho, 200 mtr spanduk, 7 backdrop, 1 paket EO media tradisional, perencanaan videotron,, sosialisasi radio swasta, sosialisasi media pemerintah, 4 paket sosialisasi Tv, 2 kali sosialisasi wamet sehat,	
4	Website milik pemda		40 web site (domain PD)	40 web site (domain PD)	40	104	39 PD, 63 kelurahan							

Tabel 2.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		17.908.090.196	12.147.521.743	67,83	16.882.368.150	14.856.595.582	88,00	22.791.445.100	12.657.908.776	55,54
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.921.000	936.145.170	98,34	866.283.500	817.376.106	94,35	804.726.800	779.530.114	96,87
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494.781.000	468.277.810	94,64	631.692.400	598.866.560	94,80	310.603.000	272.509.870	87,74
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	67.500.000	56.582.000	83,83	77.167.400	76.667.400	99,35
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.535.000	36.755.000	90,67	16.714.000	16.001.200	95,74	42.134.000	37.243.200	88,39
5	Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan	1.000.821.000	899.815.300	89,91	578.713.200	551.193.950	95,24	628.429.200	598.126.500	95,18
6	Penataan dan Pengembangan Produk Hukum	235.000.000	127.455.000	54,24	225.000.000	169.012.000	75,12	-	-	-
7	Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	7.494.448.371	3.691.261.162	49,25	5.630.708.900	4.910.152.752	87,20	8.864.208.000	3.740.957.407	42,20
8	Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.848.780.000	3.368.363.690	69,47	4.985.459.350	4.196.406.735	84,17	3.377.574.700	2.978.131.163	88,17
9	Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi	2.841.803.825	2.619.448.611	92,18	3.880.296.800	3.541.004.279	91,26	8.686.602.000	4.174.743.122	48,06

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

2.4.1 TANTANGAN

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kominfo, antara lain :

1. Perkembangan TIK yang sangat cepat;
2. Stakeholder menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif;
3. Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya *Good Governance*;
4. Kesiapan infrastruktur;
5. Masyarakat Kota Depok yang cenderung heterogen;
6. Kondisi Topografi (rawan petir – 379,2 kA dan + 441,1 Ka);
7. SDM yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi belum merata disetiap PD;
8. Masih terbatasnya jaringan infrastruktur;
9. Masih terbatasnya pelayanan publik secara online;
10. Ego Sektoral;
11. Keterbatasan Anggaran.

2.4.2 PELUANG

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Dinas Kominfo dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas, antara lain yaitu :

1. Program *Smart City*;
2. Banyaknya Lembaga Pendidikan bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Bintek bidang Komunikasi dan Informatika dari Provinsi yang terus menerus;
4. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika;
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
6. Komitmen dan kerjasama semua unsur Dinas Kota Depok dalam mewujudkan *smart city*;
7. Tersedianya aplikasi aplikasi yang sudah tersedia di Pemerintah Kota Depok, untuk memudahkan integrasi data dan pelayanan, antara lain:

NO	NAMA APLIKASI	PD	ALAMAT AKSES
1	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bag. Hukum	http://jdih.depok.go.id/
2	Siperdip (Sistem Peringatan Dini)	Bag. Pembangunan	http://172.10.10.11:97
3	SIM Satu Data Perencanaan Pembangunan	Bappeda	http://satudata.bappeda.depok.go.id/
4	IDSD	Bappeda	http://idsd.depok.go.id/
5	SIEV-K	bappeda	http://bappedadepok.emonev8.com/masuk.php
6	RKPD Online	Bappeda	http://rkpdonline.depok.go.id/rkpdol/
7	SIMPEG	BKD	http://192.168.18.6
8	Perizinan Online	BPMP2T	http://izinonline.depok.go.id/
9	Website Jamkesda	Dinkes	http://192.168.130.130
10	Simpus	Dinkes	simpus.depok.go.id

11	Sibugar	Dinkes	http://simpus.depok.go.id/sibugar
12	Sindu	Dinkes	http://simpus.depok.go.id/sindu/
13	SIPKAP (Sistem Informasi Pelaporan Dan Keamanan Pangan)	Dinkes	http://dinkes.depok.go.id/sipkap/
14	SIPO	Dinkes	http://sipo.depok.go.id/
15	Data Pokok Pendidikan	Disdik	http://dapodik.depok.go.id/
16	PPDB Online	Disdik	Local
17	Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)	Disdukcapil	Local
18	Registrasi E-KTP	Disdukcapil	Local
19	Rekam E-KTP	Disdukcapil	Local
20	Cetak E-KTP	Disdukcapil	Local
21	Sistem Perkantoran Maya	Diskominfo	http://simaya.go.id/
22	SITRA	Diskominfo	http://sitra.depok.go.id/
23	Integrasi Data	Diskominfo	http://integrasi.depok.go.id/
24	SP@CE	Diskominfo	http://space.depok.go.id/
25	mail server depok.go.id	Diskominfo	https://202.46.7.53:7071/zimbraAdmin/
26	Aplikasi Call Center	Diskominfo	local
27	Pendaftaran Hotspot gratis	Diskominfo	http://192.168.19.25/daftaruser/
28	E-Absensi	Diskominfo	http://192.168.19.111
29	E-SKP	Diskominfo	e-skp.depok.go.id
30	Web Direktori Perusahaan Kota Depok	Disnaker	http://dataperusahaan.disnakersos.depok.go.id/
31	Bursa Kerja Online	Disnaker	http://bkol.depok.go.id/
32	Sistem informasi Wajib lapor Ketenagakerjaan Perusahaan	Disnaker	http://wlkp.disnakersos.depok.go.id/
33	SI Pendataan & Perkembangan UMKM	DKUM	http://umkm.depok.go.id/
34	Sistem Informasi Koperasi	DKUM	http://simkop.dinaskoperasi-umkm.depok.go.id/index.php/auth/login

35	Pelayanan PBB dan BPHTB	BKD	http://pbb-bphtb.depok.go.id/
36	Esptpd	BKD	http://e-sppt.pbb-bphtb.depok.go.id/
37	eSPPT PBB	BKD	http://e-sppt.pbb-bphtb.depok.go.id/
38	SIMPAD	BKD	http://pad.depok.go.id/login
39	SIPKD	BKD	http://172.10.10.4
40	Dashboard Pendapatan Pajak Daerah	BKD	eis.depok.opensipkd.com
41	Online Public Access Catalog	Dinas Arsipus	http://opac.depok.go.id:12345/opac/
42	SIRS	RSUD	Local
43	SIEP (Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan)	Setda	http://172.10.10.11
44	LPSE	TIM LPSE	https://lpse.depok.go.id/eproc/
45	Reporting LPSE	TIM LPSE	202.46.7.26/reportSP1

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN OPD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagai perangkat daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK, statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel dibidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan Dinas Kominfo)	(Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Paket lelang (Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya, konsultasi sudah terlaksana)	UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE		Kurangnya sarana dan prasarana
	Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Kota Depok sudah mencapai	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan Dinas Kominfo)	(Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan terakhir dirubah oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah			
Infrastruktur e-government	Terselenggaranya infrastruktur jaringan WAN ke seluruh PD	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ketersediaan server untuk keseluruhan aplikasi memerlukan peningkatan kapasitas untuk pelayanan bagi seluruh PD	Belum seluruh PD dan masyarakat memanfaatkan jaringan imfrastruktur on line untuk keseluruhan aplikasi	Keterbatasan kuantitas dan kualifikasi tenaga teknis
	Terselenggaranya infrastruktur jaringan WAN ke 38 titik hot spot di Kota Depok		Ketersediaan SDM operator dan instruktur bagi edukasi literasi TIK belum memenuhi standar minimal	Beragamnya kualifikasi pserta bimtek dan edukasi literasi TIK aparatur dan masyarakat	Belum terpenuhi standar kualifikasi kompetensi tenaga operator di PD
	Terbangun dan termanfaatkannya 45 aplikasi (aktif) dan konten secara online		Belum adanya SOP dan SPM bagi penyelenggaraan bimtek		Perlunya sosialisasi lebih mendalam dalam bentuk bimtek dan pendampingan bagi masing-masing PD
	Terlaksananya edukasi literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK				Pemanfaatan hasil bimtek di PD bagi aparatur dan sekolah bagi masyarakat belum dapat terukur secara standar
	pembinaan monitoring dan evaluasi telematika belum optimal		Belum terkompilasinya data hasil pemetaan potensi bidang telematika di tiap PD	Kurangnya koordinasi terkait bidang telematika di masing masing PD kota Depok	Koordinasi dengan setiap PD perlu dilakukan secara berkala

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan Dinas Kominfo)	(Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik	<p>Penggunaan domain www.depok.go.id</p> <p>Pelaksanaan layanan kumpulan data melalui pemanfaatan infrastruktur <i>e-government</i></p>	Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>	Sudah memiliki aplikasi terintegrasi bidang keuangan dan pembangunan	Belum optimalnya up dating data dari PD bersangkutan	<p>Terbatasnya SDM tenaga teknis</p> <p>Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi</p> <p>Keterbatasan anggaran</p>
Diseminasi Informasi	<p>Termanfaatkannya Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), Lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas sebagai media diseminasi informasi</p> <p>Termanfaatkannya media cetak sebagai media diseminasi informasi</p> <p>Termanfaatkannya media tradisional dan media luar ruang sebagai media diseminasi informasi</p>	<p>UU No. 32/2002 tentang penyiaran</p> <p>UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No. 40/1999 tentang Pers</p> <p>PP No. 61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008</p>	<p>Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan lembaga penyiaran</p> <p>Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan media cetak</p> <p>Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan media luar ruang</p>		

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan Dinas Kominfo)	(Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Telah terbentuknya PPID di lingkungan OPD Kota Depok	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepgub No. 489/Kep-487 Diskominfo tentang Pembentukan PPID Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik			
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Setiap kecamatan di kota Depok sudah terbentuk KIM	Keputusan Walikota Depok 821.29/166/Kpts/Diskominfo/Huk/2015 ttg pembentukan KIM kota Depok 2015-2020			Belum termanfaatkannya KIM secara optimal sebagai media penyampaian informasi
Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai 48 dengan kompetensi teknis yang terbatas	UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43/1999	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai	Kebijakan penempatan pegawai	Terbatasnya pegawai secara kualitas dan kuantitas
Sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya ruang server, ruang internet publik, ruang kerja pegawai		Prioritas Penentuan Kegiatan	Kebijakan penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana
Pengadaan <i>control room</i>		UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mendapatkan data data dari semua PD untuk kepentingan <i>control room</i> , laporan untuk pimpinan sebagai pengambil keputusan		Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

<i>Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius</i>				
<i>Misi Ke-1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</i>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data	Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dan masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik	Program Smart City
		Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat	Belum dijadikan prioritas program	Banyaknya Lembaga Pendidikan bidang Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika		Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika
		Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran		Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
		Masih rendahnya kemampuan TIK aparatur dan penyedia barang/jasa	Kurangnya koordinasi antar PD	Stakeholder menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
		Terbatasnya anggaran	SDM yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi belum merata di setiap PD	Perkembangan TIK yang sangat cepat

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpiih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Masih terbatasnya jaringan infrastruktur	Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya <i>Good Governance</i>
		Belum seluruh bidang memiliki layanan e-goverment (IT)	Kurangnya pemahaman dalam layanan e-goverment	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik semakin tinggi
2	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik		Masih terbatasnya pelayanan publik secara online	
3	Peningkatan Kualitas pengadaan Barang dan Jasa	Belum semua pengadaan dituangkan dalam SIRUP		
4	Pengembangan Data dan Informasi statistik sektoral			
5	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Belum adanya Rencana kebutuhan barang unit	Kurang perhatiannya para pejabat terkait	Telah terdapat Perwal tentang standar satuan harga belanja daerah
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum adanya ketentuan kapan suatu langkah pemeliharaan harus dilakukan	Tidak ada standar pemeliharaan sarana dan prasarana	Telah terdapat Perwal tentang standar satuan harga belanja daerah
7	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Pengelola kegiatan tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan	Telah tersedia aplikasi SIEP dan SIEVK
			Penyusunan anggaran kas tidak cermat	
		Ukuran capaian kinerja belum dirumuskan secara kuantitatif	Belum dimanfaatkannya LAKIP untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, dan peningkatan kinerja	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DKP telah disusun sesuai peraturan yang berlaku dan selaras dengan dokumen atasannya (RKPD dan RPJMD)
		Pengalokasian anggaran kegiatan tidak pada nomenklatur program yang telah ditetapkan	Tidak disiplin dalam pelaksanaan proses perencanaan	Semua anggaran kegiatan harus dialokasikan sesuai dengan nomenklatur yang ada

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpiih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Data dasar yang ada tidak akurat.	Kegiatan pendataan yang dilaksanakan hasilnya tidak memuaskan	Adanya target
		Data yang sudah ada tidak pernah di update sehingga perencanaan tidak berdasarkan data yang terkini		Adanya tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan
9	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur Diskominfo

3.3 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Belum dijadikan kegiatan prioritas untuk peningkatan SDM dalam kompetensi dibidang TIK	Belum konsisten penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki	Tersedianya sarana pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
2	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Belum terpenuhi kepatuhan terhadap Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi	Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang berkompetensi	Kebutuhan masyarakat dan PD terhadap layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan transparan
			Belum tersertifikasi secara ISO 9001 dan ISO 27001	
3	Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK	Belum dilakukan secara optimal pemberdayaan masyarakat tentang TIK	Keterbatasan Anggaran	Tingginya antusias masyarakat mengenai TIK
			Belum adanya komunitas masyarakat berbasis TIK	
4	Tersebar nya Informasi berbasis TIK	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tersebarnya informasi berbasis TIK	Kurangnya perusahaan - perusahaan yang benar benar berkompeten untuk berkerjasama dalam penyebaran informasi berbasis TIK	sudah terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
			Keterbatasan Anggaran	
			Kurangnya SDM yang berkompetensi	Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan informasi
5	Meningkatnya mediasi dan ajudikasi sengketa informasi	Kurangnya SDM yang berkomptensi dalam tugasnya sebagai operator PPID	Kurangnya antusias masyarakat untuk permintaan data/informasi ke PPID masing - masing PD	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Keterbatasan Anggaran		Sudah adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Teknologi infrastruktur yang digunakan untuk mendukung konektivitas jaringan untuk ke daerah daerah masih menggunakan metode lama, belum menggunakan fiber optik	Keterbatasan Anggaran Kekurangan SDM yang berkompotensi	Kebutuhan masyarakat akan komunikasi digital

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi : 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini yang meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
2. Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Citayam sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota; dan
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini meliputi:

1. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
3. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pengembangan pola ruang di Kota Depok dilaksanakan melalui perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kota Depok memiliki luas ± 882,30 Ha yang tersebar di Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung :
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.

2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa secara seimbang;
 - b. pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan Strategis Kota merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomu, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi , terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional.
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.

4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan	Keterbatasan anggaran	Terbatasnya jaringan infrastruktur TIK	Perkembangan TIK yang sangat cepat
2	Pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah	Koordinasi belum optimal	Terbatasnya pelayanan public secara online	Stakholder menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
3	Penyediaan hotspot wifi (<i>wireless-fidelity</i>)		Ego sektoral	Masyarakat Kota Depok yang cenderung heterogen Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya <i>good governance</i>

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016 – 2021 antara lain :

1. Penerapan Kota Cerdas (*Smart City*)

Penerapan konsep kota cerdas yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mengelola berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien serta memberikan informasi yang tepat kepada pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan yang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan, peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Integrasi Data

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis TIK.

3. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (layanan *online*)

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah kota Depok akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya : perijinan) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap TIK (akses gratis pelayanan internet)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

5. Kebutuhan pelaporan / informasi untuk pengambilan kebijakan pimpinan (*Control Room*)

Kebutuhan akan informasi yang valid dan akurat yang bisa mencakup informasi mengenai keadaan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dll seluruh kota Depok, sehingga memudahkan pimpinan dalam pengambilan berbagai kebijakan.

6. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

7. Diseminasi Informasi Publik

Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan dinamika sosial dan politik mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi public serta bagaimana kepentingan pemerintah dan public dapat bertemu dan terinformasi

8. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik

Kebutuhan data dasar dan sektoral sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan sehingga ketersediaan data statistik sangat dibutuhkan.

9. Keamanan Informasi

Penyelenggaraan E-Government di Kota Depok memerlukan sistem informasi yang aman dan akurat sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dituju dan bagaimana cara mencapainya, oleh karenanya diperlukan keterpaduan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik ditingkat daerah, regional maupun nasional.

Visi diperlukan sebagai pencerminan cara pandang ke depan kemana organisasi pemerintah akan diarahkan agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Sesuai dengan ketentuan, maka visi perangkat daerah mengikuti visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerahan Kota Depok, yaitu :

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi tersebut merupakan visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan.**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Diskominfo Kota Depok mendukung pencapaian Misi Wali Kota Depok yang pertama yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kota Depok

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2019	2020	2021
Visi : Kota Depok yang Unggul, Aman dan Religius					
Misi I :	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan				
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kinerja Diskominfo	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	B	BB
Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informasi pada layanan pemerintah	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	30%	40%	50%
		Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	40%	60%	75%
	Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan public	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	5 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik	6 Jenis Statistik
	Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika	Persentase aplikasi yang diuji	40%	60%	80%

Tabel 4.2 Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja			Penjelasan/ Formulasi	Keterangan
			2019	2020	2021		
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP	D	B	B	BB	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Dilakukan oleh Inspektorat Kota	
Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informasi pada layanan pemerintah	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	10%	30%	40%	50%	Tipe Perhitungan : Kumulatif e-gov = Akumulasi cluster layanan e-gov 10 cluster layanan e-gov	10 Cluster layanan : 1. Pengaduan 2. Perizinan & Pendapatan 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Perencanaan 6. Perekonomian 7. Kependudukan 8. Kepegawaian 9. Informasi Publik 10. Informasi Publik
	Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi	9%	40%	60%	75%	Tipe Perhitungan : Kumulatif IT = 35% JI + 35% IP + 30% CCTV Cakupan JI = $\frac{\text{Akumulasi } \Sigma \text{ area kecamatan yang terintegrasi dalam jaringan intranet}}{11 \text{ Kecamatan}} \times 100\%$ Cakupan IP = $\frac{\text{Akumulasi jumlah titik free wifi}}{1000 \text{ titik}} \times 100\%$ Cakupan CCTV = $\frac{\text{Akumulasi } \Sigma \text{ jumlah titik free wifi}}{1000 \text{ CCTV}} \times 100\%$	IT = Infrastruktur Teknologi Informatika JI = Jaringan Internet IP = Internet Publik CCTV = Close Circuit Television
Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Tipe Perhitungan : Kumulatif Perhitungan dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Barat	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja			Penjelasan/ Formulasi	Keterangan
			2019	2020	2021		
Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	N/A	5 jenis statistik	6 jenis statistik	6 jenis statistik	Tipe perhitungan : Kumulatif Jenis bidang statistik : statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perindustrian & perdagangan, statistik kesehatan dan statistik pertanian	
Meningkatnya Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika	Persentase aplikasi yang diuji	N/A	40%	60%	80%	Tipe perhitungan : Kumulatif <u>Akumulasi aplikasi yang diuji</u> Total aplikasi utama	Total aplikasi utama 28 buah

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KOTA DEPOK

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Diskominfo Kota Depok periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan Diskominfo Kota Depok dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Diskominfo Kota Depok dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*)
 1. Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi;
 2. Memiliki aturan dan kebijakan pelaksanaan *e government* dan keterbukaan informasi publik;
 3. Memiliki akses ke lingkungan akademisi
 4. Komitmen kepala daerah dalam pembangunan sarana prasarana bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, Persandian dan Statistik
- Kelemahan (*Weakness*)
 1. Masih belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana persandian;
 3. Belum optimalnya pelayanan berbasis teknologi informasi;
 4. Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi;
- Peluang (*Opportunity*)
 1. Tingkat layanan publik;
 2. Tingginya afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi;
 3. Komitmen kepala daerah untuk mendukung peningkatan teknologi informasi;
 4. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal untuk
- Tantangan (*Threat*)
 1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;
 2. Penduduk yang heterogen;
 3. Kurangnya sarana dan prasarana keamanan data;
 4. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Visi : Kota Depok yang Unggul, Aman dan Religius			
Misi I :	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan		
Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Diskominfo	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Menciptakan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Pengelolaan sarana/prasarana, SDM, keuangan serta administrasi perkantoran Diskominfo
Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Menggunakan teknologi informatika pada berbagai aspek layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
	Meningkatnya layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat
		Memberikan tanggapan pengaduan yang cepat, tepat dan akurat	Pemberdayaan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Menyediakan data-data statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya system keamanan komunikasi dan informatika	Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dipergunakan	Pengujian keamanan aplikasi yang dipergunakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program : Pengembangan Layanan Teknologi Informatika

Kegiatan :

- Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung *E-Government*;
- Pengelolaan Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok
- Layanan M-CAP (Mobile Community Acces Point / Mobile Internet)
- Penyelenggaraan Layanan E-Procurement (SPSE)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
- Pengembangan Aplikasi LPSE
- Pembangunan Infrastruktur Jaringan
- Pengembangan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
- Penyediaan Layanan Internet
- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
- Pengembangan Data Warehouse
- Pengembangan Smart City

2. Program : Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan :

- Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok;
- Layanan Siaran melalui Media Elektronik;
- Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa;

- Layanan Informasi melalui Portal Pemerintah Kota Depok;
- Layanan informasi Publik;
- Forum Penggiat Teknologi Informasi
- Peningkatan SDM TIK

3. Program : Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PPID)
- Pelayanan Pengaduan Publik
- DED Videotron
- Pelayanan pengaduan Emergency Call 112

4. Program : Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM

Kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Smart City

5. Program : Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Pengadaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Program : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja.

8. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kegiatan :

- Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan Renja
- Penyusunan Rencana Induk Pengembanagn E-Government

URUSAN STATISTIK

1. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Depok
- Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
- Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok
- Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
- Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan

URUSAN PERSANDIAN

1. Program Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Penataan Radio Komunikasi
- Pengelolaan Persandian

Secara rinci rencana program dan kegiatan beserta target indikator kinerja disajikan dalam matriks (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
					2019	2020	2021				2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
											Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN WAJIB												27,956,282,200		28,294,858,150		26,425,202,053		82,706,342,403
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												26,544,302,200		26,689,608,150		24,894,952,053		78,158,862,403
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												26,544,302,200		26,689,608,150		24,894,952,053		78,158,862,403
Kota Depok yang Unggul, Aman dan Religius	Misi Ke : 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan	Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Diskominfo	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	B	BB	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,188,487,500	100%	1,233,208,150	100%	1,220,959,000	100%	3,672,654,650
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	64 Jenis	65 Jenis	114,550,000	65 Jenis	133,413,000	65 Jenis	133,413,000	65 Jenis	411,376,000
								Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	19 Jenis	19 Jenis	64,550,000	8 Jenis	70,000,000	8 Jenis	65,077,000	19 Jenis	199,627,000
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	8 Jenis	6,495,000	8 Jenis	7,250,800	8 Jenis	7,212,000	8 Jenis	20,957,800
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	16 Jenis	14,996,000	16 Jenis	16,486,000	16 Jenis	16,486,000	16 Jenis	47,968,000
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	5 Jenis	5 Jenis	196,000,000	5 Jenis	206,058,350	5 Jenis	199,870,000	5 Jenis	601,928,350
								Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	180 OH	330 OH	791,896,500	300 OH	800,000,000	350 OH	798,901,000	350 OH	2,390,797,500
								Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah penyediaan sarana informasi	14 Jenis	19 Jenis	-	19 Jenis	-	19 Jenis	-	19 Jenis	-
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	440,639,000	100%	625,000,000	100%	475,000,000	100%	1,540,639,000	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	9 Unit	100,000,000	12 Unit	150,000,000	12 Unit	150,000,000	12 Unit	400,000,000	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
					2019	2020	2021				2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
											Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	22 Jenis	18 Jenis	74,000,000	18 Jenis	75,000,000	18 Jenis	75,000,000	18 Jenis	224,000,000
								Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	2 Jenis	6 Jenis	266,639,000	7 Jenis	400,000,000	4 Jenis	250,000,000	7 Jenis	916,639,000
								Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Prosentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	N/A	50%	115,660,000	75%	201,400,000	100%	201,400,000	100%	518,460,000
								Pelaksanaan Capacity Building	Peningkatan kompetensi pegawai Diskominfo									
								Peningkatan Jumlah Peserta SDM TIK	Jumlah Peserta Sertifikasi TIK		5 sertifikasi	115,660,000	7 orang	201,400,000	7 orang	201,400,000	19 orang	518,460,000
								Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	772,028,700	100%	1,305,000,000	100%	1,326,947,100	100%	3,403,975,800
								Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53,399,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	51,999,900	1 Dokumen dan 100 Orang	160,398,900
								Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000
								Forum Penggiat Teknologi Informasi	Jumlah Event	1 lomba	1 lomba	122,574,800	1 Event	300,000,000	1 Event	280,001,000	2 kali event, 1 Kali Lomba	702,575,800
								Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	N/A	4 Dokumen	596,054,900	4 Dokumen	950,000,000	4 Dokumen	944,946,200	12 Dokumen	2,491,001,100
								Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP : BB	D	B	36,000,000	B	50,000,000	BB	50,000,000		136,000,000
								Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	36,000,000	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	50,000,000	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	50,000,000	2 Dokumen semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 laporan RFK	136,000,000
		Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	30%	40%	50%	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	10%	30%	15,340,047,000	40%	15,730,000,000	50%	14,684,847,653	50%	45,754,894,653
				Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	40%	60%	75%	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	9%	40%		60%		75%		75%	
									Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government	6 Aplikasi	6 Aplikasi	469,900,000	5 Aplikasi	650,000,000	5 Aplikasi	612,280,000	22 Aplikasi	1,732,180,000

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
					2019	2020	2021				2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
											Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur jaringan	200 Wifi dan 1 kecamatan terhubung FO	50 Titik Wifi, 1 control room, 3 Kantor Pemerintah terhubung FO	4,871,220,000	50 Titik Wifi, 2 Kantor Pemerintah terhubung FO	3,250,000,000	50 Titik Wifi	1,938,610,853	350 Titik Wifi, 6 Kantor Pemerintah yang terhubung FO	10,059,830,853
								Penyediaan Perangkat Pendukung Smart City	Jumlah Perangkat Pendukung smart City	N/A	10 Titik CCTV dan 10 sensor	989,700,000	10 Titik CCTV dan 10 sensor	1,150,000,000	10 Titik CCTV dan 10 sensor	1,129,568,000	30 Titik CCTV dan 30 sensor	3,269,268,000
								Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Jumlah co-location server OPD	2 co-Location	2 co-Location	1,245,000,000	2 co-Location	3,600,000,000	2 co-Location	3,040,250,000	8 co-Location	7,885,250,000
								Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 Jenis Layanan	4 Jenis	5,765,280,000	4 Jenis	5,500,000,000	4 Jenis	5,697,840,000	4 Jenis Layanan	16,963,120,000
								Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Jenis infrastruktur jaringan	3 Jenis (LAN, WAN dan Running Text)	2 Jenis (LAN dan WAN)	1,385,300,000	2 Jenis (LAN dan WAN)	800,000,000	2 Jenis (LAN dan WAN)	1,491,300,000	2 Jenis (LAN dan WAN)	3,676,600,000
								Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah domain dan Subdomain depok.go.id yang terlayani	1 Portal Domain dan 110 Subdomain	1 Portal Domain dan 110 Subdomain	288,698,000	2 Portal Domain, 1 domain dan 120 Subdomain	380,000,000	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	374,999,800	2 Portal, 1 Domain dan 120 Subdomain	1,043,697,800
								Pengembangan Data Warehouse	Jumlah Cluster Data yang terhubung ke Data Warehouse	N/A	1 cluster data	324,949,000	1 cluster data	400,000,000	1 cluster data	399,999,000	1 cluster data	1,124,948,000
			Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik	Baik	Baik	Baik	Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	N/A	50%	8,651,440,000	75%	7,545,000,000	100%	6,935,798,300	100%	23,132,238,300
								Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah media informasi program pembangunan kota Depok	6 Jenis Media Informasi	9 Jenis Media Informasi	1,734,064,000	9 Jenis Media Informasi	1,400,000,000	9 Jenis Media Informasi	1,361,282,700	9 Jenis Media Informasi	4,495,346,700
								Layanan Siaran melalui Media Elektronik	Jumlah publikasi melalui media elektronik	7 publikasi	3 kali Talkshow di radio, 3 paket sosialisasi melalui televisi, sosialisasi melalui videotron dan running text	496,999,000	7 publikasi	430,000,000	7 publikasi	421,133,800	7 publikasi	1,348,132,800
								Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah publikasi di media massa	4 Kegiatan	3000 publikasi	3,496,049,000	1.505 publikasi	3,000,000,000	1000 publikasi	2,696,625,000	5505 publikasi	9,192,674,000
								Layanan M-CAP (Mobile Community Access Point/ Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah kota Depok	5 Jenis Lokasi	288 kunjungan	194,199,000	288 kunjungan	155,000,000	288 kunjungan	151,684,800	288 kunjungan	500,883,800

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
					2019	2020	2021				2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
											Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Layanan Informasi Publik	Jumlah Berita/Informasi	550 berita/informasi per bulan	550 berita/informasi per bulan	894,840,000	560 berita/informasi per bulan	910,000,000	560 berita/informasi per bulan	900,000,000	560 berita/informasi per bulan	2,704,840,000
								Sistem layanan informasi Publik	Jumlah Berita	150 berita / Informasi perbulan	150 berita / Informasi perbulan	-						
								Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PID)	Jumlah Pelayanan Informasi publik pada setiap OPD	39 PPID OPD	39 PPID OPD	-						
								Pengelolaan pelayanan pengaduan publik	Jumlah Pengaduan yang terlayani	5 Jenis Layanan	1000 pengaduan yang terlayani	458,541,000	1100 pengaduan yang terlayani	450,000,000	1100 pengaduan yang terlayani	448,029,000	1100 pengaduan yang terlayani	1,356,570,000
								Penyusunan DED Videotron	Jumlah dokumen Kajian					-			1 Dokumen Utilitas	-
								Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	Jumlah layanan	1 layanan	1 layanan	1,289,950,000	1 layanan	1,100,000,000	1 layanan	900,000,000	1 layanan	3,289,950,000
								Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86,798,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	57,043,000	1 Kegiatan	243,841,000
URUSAN STATISTIK												1,205,630,000	1,205,250,000	1,200,250,000	3,611,130,000			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												1,205,630,000	1,205,250,000	1,200,250,000	3,611,130,000			
			Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	5 Jenis Statis tik	6 Jenis Statis-tik	6 Jenis Statis-tik	Pengembangan Data dan Informasi statistik sektoral	Jumlah jenis informasi statistik yang dikelola	N/A	5 Jenis Statistik	1,205,630,000	6 Jenis Statistik	1,205,250,000	6 Jenis Statistik	1,200,250,000	6 Jenis Statistik	3,611,130,000
								Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam angka	Jumlah buku dalam angka dan kecamatan dalam angka Kota Depok yang Di cetak		120 buku DDA tahun 2019 dan 550 buku KCDA Tahun 2019	133,800,000	120 buku DDA tahun 2020 dan 550 buku KCDA Tahun 2020	110,250,000	120 buku DDA tahun 2018 dan 550 buku KCDA Tahun 2021	110,250,000	120 buku DDA tahun 2018 dan 550 buku KCDA Tahun 2021	354,300,000
								Penyusunan Analisis ekonomi makro Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	247,388,000	3 Dokumen	260,000,000	3 Dokumen	260,000,000	3 Dokumen	767,388,000
								Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	271,124,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	821,124,000
								Penyusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	205,500,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	620,500,000

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
					2019	2020	2021				2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
											Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	179,800,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	539,800,000
								Penyusunan Indeks Kepuasa n Masyarakat	Jumlah dokumen	N/A	1 Dokumen	168,018,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	508,018,000
URUSAN PERSANDIAN												206,350,000	400,000,000	330,000,000	936,350,000			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												206,350,000	400,000,000	330,000,000	936,350,000			
			Meningkat nya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Persenta se aplikasi yang di Uji	40%	60%	80%	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase aplikasi yang di Uji	N/A	40%	206,350,000	60%	400,000,000	80%	330,000,000	80%	936,350,000
								Pengelolaan Persandian	Jumlah peeserta sosialisasi / Bimtek,		235 orang		235 orang		235 orang		235 orang	
									Jumlah Aplikasi yang di amankan (IT Security Assesment)	10 Aplikasi	7 aplikasi	206,350,000	7 aplikasi	400,000,000	7 aplikasi	330,000,000	31 aplikasi	936,350,000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO KOTA DEPOK YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan.

Target capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang Mengacu pada RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Web site milik pemerintah daerah	102	110	120	130	130
2	Pembangunan Infrastruktur TI	175	50	50	50	400
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	46	59	62	64	64
4	Buku Depok Dalam Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Buku PDRB Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 – 2021 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan dan visi kota Depok.

Dalam perjalanannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok ini mengalami revisi sesuai amanat RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Depok untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021 diharapkan dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari segi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak

terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DEPOK**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sidik Mulyono', is centered below the title.

DR. Ir. SIDIK MULYONO, M.Eng
NIP. 196701241986021001

